



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

JL. H. AgusSalim No. 1 KodePos 25651

Telp. (0756) 21301 Fex. 22070

PAINAN

MASA SIDANG : I
TAHUN SIDANG : 2020
RAPAT KE : 5
JENIS RAPAT : Rapat Konsultasi

RISALAH RAPAT KONSULTASI PIMPINAN DPRD, KETUA FRAKSI DAN KETUA KOMISI DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jenis Rapat : Rapat Konsultasi

Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Jumat, 8 Mei 2020
Waktu : Pukul 10.¹⁵ Wib s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Pimpinan Rapat : **H. APRIAL HABAS BUYA PIAI, SH, MH**
SekretarisRapat : **JARIZAL, SE**

Acara : Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi, Ketua Komisi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pergeseran APBD 2020 untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

I. Rapat di hadiri

PimpinandanAnggota DPRD KabupatenPesisir Selatan :

1. Ermizen, S. Pd : Ketua
2. Hakimin, SH : Wakil Ketua
3. Jamalus Yatim : Wakil Ketua
4. Jarizal, SE : Sekretaris/bukan Anggota
5. Novermal, SH : Ketua Fraksi PAN
6. Aljufri, SH, MH : Ketua Fraksi NasDem
7. Drs. Jamalus, MM : Fraksi PKS
8. Hanafi Herman, S. Pt : Ketua Fraksi Demokrat
9. Syafril Saputra, SH : Ketua Fraksi GOLKAR
10. Julianavia, SH, M.Si : Fraksi Persatuan Pemb. Hati Rakyat Indonesia
11. Drs. Daskom, M. Pd : Ketua Komisi/Fraksi PDIP
12. Ermiwati, SE : Sekretaris Fraksi GOLKAR
13. Alkisman Nurman, S. IP : Fraksi Bintang Karya Bangsa/Ketua Komisi II

II. Sekretariat DPRD Kab. Pesisir Selatan

1. Mulyadi M., AP, M.Si : Kabag Persidangan dan Risalah
2. Ikhsan Busra, SH : Kabag Hukum dan PerUndang-Undangan
3. Pris Derika Habdi, SH : Kabag Umum
4. EdmonDantes, SE, MM : KasubagPersidangan
5. Abadi Jaya, S.SosI, M.Si : Kasubag Risalah
6. Daswandi, A. Md : Kasubag Humas dan Protokoler

III. Jalannya Rapat

Pimpinan Rapat (Ermizen, S. Pd)

Penghormatan pimpinan kepada hadirin yang hadir.

Ucapan puji syukur kepada Allah SWT, dan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW.

Pesan Pimpinan sebagai berikut :

- ✓ Dengan mengucapkan "*Bismillahirrahmanirrahim*" Pimpinan membuka rapat Jam 10.¹⁵ Wib dengan ketukan palu 3 (tiga) kali.
- ✓ Sesuai undangan yang disampaikan pada anggota DPRD bahwa pada saat ini rapat tentang pergeseran APBD Tahun 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19.
- ✓ Sebelum rapat ini dimulai kami Pimpinan DPRD ingin jelaskan tentang tidak terlaksananya rapat tutup buka sidang pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020. Kegiatan tutup buka sidang tidak jadi karena ada saran dari anggota DPRD karena kita masih dalam kondisi PSBB pembatasan jarak maka perlu dipertimbangkan untuk rapat hari itu, sehingga waktu itu dilakukan sosialisasi video conference bagi anggota DPRD dan pada saat itu saya juga ada rapat dengan Bupati dan Forkopimda tergabung dalam gugus tugas kabupaten dengan agenda masih membicarakan tentang percepatan penanggulangan Covid-19.
- ✓ Untuk agenda Bamus waktu itu memang akan dilaksanakan dengan video conference tetapi karena kehadiran anggota dan belum dapat memaksimalkan video conference juga tidak dapat dilaksanakan namun nanti pada rapat ini akan kita bicarakan dan diambil kesepakatan kapan bisa dilaksanakan rapat Badan Musyawarah tersebut.
- ✓ Informasi terakhir setelah rapat tanggal 28 April 2020 ada kesepakatan antara DPRD dengan TAPD kelanjutan pikir anggota DPRD khusus tentang RTLH dapat dilanjutkan tetapi informasi dari Kepala Perkimtan informasi dari Kepala BPKD anggaran tidak ada, setelah saya konfirmasi kepada Kepala BPKD kegiatan RTLH memang tidak dapat dilaksanakan karena anggaran memang tidak ada. Kata Kepala BPKD Jangan anggaran untuk RTLH untuk memenuhi kebutuhan pusat sekitar 21 milyar saja tidak dapat dipenuhi.

Alkisman, S. IP. Dt. Rajo Indo

- ✓ Yang dikatakan Pemerintahan Daerah itu adalah Bupati dengan DPRD, dan DPRD adalah bagian dari itu, sebagai wakil rakyat atau DPRD sesuai aturan kalau memang seperti permainan BPKD, DPRD punya hak kapan lagi hak DPRD itu digunakan. Kesepakatan yang telah dibuat bisa dibatalkan oleh TAPD secara sepihak tanpa ada disampaikan ke DPRD kan seolah-olah tidak ada lagi saling menghormati dua lembaga ini.
- ✓ Inpres Nomor 04 Tahun 2020 sekarang sedang digugat di MK, maka DPRD tingkat kabupaten tetap jalan sesuai yang diharapkan. Setiap kali rapat pasti ada risalah rapat dan itu bisa dilihat kembali. Sekarang ada kegiatan anak yatim yang dibantu oleh Pemerintah apakah ini tidak salah secara aturan yang ada.
- ✓ Anggaran yang dipangkas agar harus ada secara tertulis dari TAPD ke Pimpinan DPRD termasuk anggaran Setwan perlu dirapatkan dengan Komisi II terlebih dahulu.
- ✓ Dan dulu kita rapat tanggal 28 April 2020 ada beberapa kesepakatan terutama tentang pikir anggota DPRD jangan diganggu dulu, dan pencairan dana hibah bansos sekarang tidak satupun yang dikabulkan oleh Pemerintah Daerah atau TAPD.
- ✓ Anggaran Sekretariat DPRD tinggal 4 milyar dan untuk DPRD tinggal 2 milyar terdiri dari kegiatan reses dan anggaran untuk pembahasan ranperda. Kedepan agar semua masalah keuangan dijelaskan kepada anggota DPRD termasuk masalah anggaran pikir dan anggaran Setwan yang telah dinolkan oleh TAPD.

Syafril Saputra, SH

- ✓ Untuk meleakalkan kegiatan DPRD berikutnya perlu dilakukan rapat paripurna tutup masa sidang I dan buka masa sidang II dan ini perlu kesepakatan kapan dilaksanakan.

- ✓ Dan saya lihat sekarang ini DPRD sangat lemah dan dulu TAPD sudah janji untuk RTLH dapat dilaksanakan nyatanya juga tidak bisa dilaksanakan. Sudah pokir tidak dapat dilaksanakan dan anggaran Setwan juga dipangkas dan DPRD tidak dilibatkan.
- ✓ Kondisi ini sudah sangat luar biasa karena saya juga bekas kontraktor dan 10 tahun jadi Ketua Gapensi Pesisir Selatan saya tahu semua kegiatan, yang menyangkut kepentingan mereka dikerjakan tetapi pokir tidak dilaksanakan, pengakuan TAPD sampai sekarang masih bicara mencari uang pada hal kegiatan yang belum dilelang masih disembunyikan sementara kegiatan DPRD di Setwan dinolkan dan pokir anggota DPRD tidak dilaksanakan.

Novermal, SH

- ✓ Kondisi sekarang banyak yang perlu kita sikapi untuk itu perlu diagendakan rapat tutup buka sidang, rapat bamus dan rapat dengar pendapat kalau bisa video conference saja. Untuk anggaran minimal 1 kali perjalanan bagi anggota DPRD agar dianggarkan oleh TAPD. Saya sampai di Painan melihat pembangunan mesjid terapung baru pancang anggaran kalau ditafsir masih 7 milyar dan ini belum urgen, pembangunan beberapa puskesmas di jajaran Dinas Kesehatan dan ada pengadaan masker 100 juta dan anggaran pembelian masker tidak sesuai harga pasaran dan ini perlu pengawasan DPRD kedepannya karena harga pasaran masker berada pada angka 4000/lembar.

Ermiwati, SE

- ✓ Setiap ada pemotongan oleh TAPD hanya dihadapkan pada pokir-pokir anggota DPRD dan anggaran Setwan. Saya kecewa anggaran RTLH dan bantuan mesjid tidak jadi direalisasikan sesuai janji TAPD maka saya melihat DPRD ini sudah dikebiri oleh Pemerintah.
- ✓ Hasil rapat dengar pendapat Komisi I dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa banyak data bantuan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya bahkan ada orang yang meninggal masih dapat bantuan saya kira itu juga menjadi perhatian bagi di DPRD sebagai lembaga pengawasan.

Aljufri, SH, MH

- ✓ Apa yang disampaikan anggota DPRD tadi sangat memperhatikan untuk itu DPRD perlu pertanyakan peran Sekda sebagai ketua TAPD. Dan DPRD yang dirugikan dalam hal ini perlu bertanya kepada kab/kota lain apakah memang seperti itu kewenangan TAPD/Sekda.
- ✓ Karena tidak mungkin apa yang dirasakan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dengan DPRD Kab/kota lain tidak sama, kita wakil rakyat tetapi seolah-olah anggaran daerah ini seperti TAPD atau neneknya yang punya, kita perlu ada keadilan kewenangan sesuai tugas dan fungsi DPRD dengan TAPD karena dana itu anggaran masyarakat yang dikumpul harus sama-sama kita pergunakan secara transparan.
- ✓ Sekwan tolong pelajari job skription karena jika Sekwan itu bekerja 70 % untuk kedepan dan 30 % ke DPRD perlu kita evaluasi. Semua kegiatan dipangkas kalau kita sepakat kantor perwakilan itu tidak penting kita tetap dukung anggaran untuk Covid-19. Tapi jangan buat DPRD ini tidak berdaya karena DPRD ini adalah kumpulan wakil rakyat yang dipilih rakyat.

Julianavia, SH. M.Si

- ✓ Kesepakatan rapat sebelum ini tanggal 28 April 2020 disepakati tentang perjalanan satu kali dan RTLH dapat dilakukan sekarang bagaimana informasi kami juga tidak tahu. Kalau kita lihat Kepala BPKD hanya melihat anggaran pokir dan kegiatan DPRD.
- ✓ Sekarang perlu kita tanyakan tentang anggaran KPU dan Panwaslu termasuk anggaran hari jadi Kabupaten yang tidak jadi dilaksanakan tentu ada anggarannya. Kapan perlu kedepan agar dilihat lagi anggaran OPD yang dipotong untuk Covid-19.
- ✓ Anggaran Setwan 19 milyar yang dipotong 10 milyar ini perlu diperjelas karena dari 4 milyar anggaran tersisa anggaran yang banyak anggaran Setwan mohon dijelaskan.

Buya Piai Pimpinan Rapat (Ermizen, S. Pd)

- ✓ Untuk data kami Pimpinan DPRD sudah minta ke TAPD tetapi sampai sekarang belum sampai kepada kami. Untuk acara tutup buka sidang dan agenda Bamus juga akan kita lakukan. Saya perlu tanya pada anggota DPRD bagaimana dengan TAPD ini karena mereka sudah sepakat permintaan kita sebagai anggota DPRD nyatanya masih belum ada kejelasan.
- ✓ Selanjutnya Pimpinan rapat menyerahkan pimpinan rapat ke Wakil Ketua DPRD H. Aprial Habas Buya Piai, SH, MH *dengan ketukan palu Ikali*.

Pimpinan Rapat (H. Aprial Habas Buya Piai, SH, MH)

- ✓ Pimpinan rapat saya ambil alih *dengan ketukan palu Ikali*. dan selanjutnya dipersilahkan pada anggota yang hadi untuk menyampaikan pendapatnya.

Ermiwati, SE

- ✓ Menurut saya Untuk TAPD agar dihadirkan nanti siang karena kita ingin bicara dengan jelas dan lebih tegas lagi dengan TAPD.

Drs. Jamalus, MM

- ✓ Saya kira kalau untuk menghadirkan TAPD tidak pas nanti siang, maka kita perlu buat surat terhadap apa yang dipertanyakan pada TAPD dan minta mereka menjawab dan dikasih waktu menjawab kalau mereka tidak jawab mereka hadir kapan perlu kita usir saja dalam rapat nanti, karena tidak baik setiap kali rapat kita selalu membicarakan hal yang sama yang tidak ada ujungnya.

Pimpinan Rapat (H. Aprial Habas , SH, MH)

- ✓ DPRD ini memang tidak ada apa-apanya oleh Pemerintah, sekarang perlu kesepakatan kita bersama DPRD itu punya hak bertanya. Maka perlu hearing komisi dengan OPD lihat semua kegiatan yang ada di OPD mana yang dikerjakan mana yang tidak dan kalau dikerjakan dibelakangnya siapa jangan bencana ini menjadi kesempatan bagi mereka. Kalau pendapat saya semua kegiatan fisik harus dihentikan karena anggota DPRD sudah saling menyalahkan maka tidak perlu kita salah paham sesama kita maka kedepan perlu hearing dengan seluruh OPD yang ada termasuk anggaran Setwan perlu dijelaskan.
- ✓ Sekwan memang perlu juga disampaikan Setwan itu adalah bagian dari DPRD untuk itu perlu komunikasi yang baik antara DPRD dengan Pemerintah.
- ✓ Untuk acara tutup buka sidang semuanya memang awal dari sana dan ini perlu dilaksanakan, dan untuk pertemuan dengan TAPD juga kurang sepakat nanti siang.

Drs. Jamalus, MM

- ✓ Tutup buka sidang itu penting untuk evaluasi kegiatan DPRD termasuk kondisi di Setwan, kondisi sekarang jangan kita anggota DPRD dengan lainnya saling gontok-gontokan kalau untuk hearing kondisi sekarang saya kira perlu kita laksanakan dengan OPD.

Syafril Saputra, SH

- ✓ Sekarang perlu kesepakatan kalau kita perlu hearing kita hearing, karena kita ingin lihat apa yang terjadi sebenarnya di OPD sebab sudah keterlaluhan kegiatan DPRD saja jangan kan kegiatan luar provinsi dalam kabupaten saja dinolkan oleh TAPD.

Pimpinan Rapat (H. Aprial Habas Buya Piai, SH, MH)

- ✓ Untuk acara tutup buka sidang nanti kita agendakan dan rapat ini memang perlu mengambil keputusan kalau fraksi rapat agar disampaikan kepada anggotanya tentang hasil rapat sehingga kita anggota DPRD sama-sama memahami tentang hasil rapat yang diputuskan sehingga di group whatsapp tidak ribut lagi.

Jarizal, SE (Sekretaris DPRD Kab. Pessel)

- ✓ Sesuai aturan Sekwan itu mewadahi dua lembaga eksekutif dan legislatif dan untuk anggaran perjalanan dinas Dewan sebanyak 70 % dari sisa anggaran yang tersedia sehingga berada diangka 5 milyar tetapi mereka TAPD minta dari jumlah anggaran yang ada sehingga berada diangka 10 milyar.

Novermal, SH

- ✓ Tutup buka sidang agar tetap tanggal awal untuk rapat dengan Pemerintah saya kira cukup dengan Banggar kalau komisi nanti terpotong-potong informasi yang didapatkan.

Pimpinan Rapat (H. Aprial Habas Buya Piai, SH, MH)

- ✓ Saya lebih cenderung sebaliknya dengan Banggar akan terpotong karena yang punya mitra kerja dan lebih teknis itu adalah Komisi bukan Banggar. Bahkan sekarang honor tenaga honor tidak dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

Alkisman, S. IP, Dt. Rj. Indo

- ✓ Untuk tutup buka sidang sepakat kita laksanakan dan kegiatan Bamus nanti siang Bamus agar mengagendakan hearing komisi dengan mitra kerja, disamping kesepakatan sebelumnya juga harus menjadi perhatian kita pada rapat ini seperti pokir, RTLH dan bantuan sosial mesjid.

Jarizal, SE (Sekretaris DPRD Kab. Pessel)

- ✓ Dapat disampaikan pada tanggal 30 April 2020 kemarin ada surat masuk tentang LKPJ Bupati tahun 2019 dari Pemerintah Daerah.

Ermawati, SE

- ✓ Pimpinan untuk pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2019, apakah masih butuh DPRD TAPD.

Pimpinan Rapat (H. Aprial Habas Buya Piai, SH, MH)

- ✓ **Kesimpulan rapat untuk lebih jelasnya perlu disepakati satu persatu :**
 1. Apakah sepakat Komisi rapat dengan mitra kerja untuk membicarakan tentang pergeseran APBD Tahun 2020 untuk anggaran Covid-19 sepakat **dengan ketukan palu 1 kali.**
 2. Tutup buka masa sidang dapat kita laksanakan nanti dan Bamus agar mengagendakan kegiatan DPRD siang nanti setelah Sholat Zuhur **dengan ketukan palu 1 kali.**
 3. Yang telah disepakati oleh TAPD pada rapat sebelumnya tanggal 28 April 2020 untuk Pokir anggota DPRD kegiatan RTLH dan Bantuan Sosial agar tetap dapat dilaksanakan **sepakat, dengan ketukan palu 1 kali.**
 4. Kesimpulan rapat di atas agar diagendakan dalam kegiatan DPRD pada rapat Bamus nanti siang sehingga semua akan menjadi legal dan berjalan sesuai yang diharapkan.

Hakimin, SH

- ✓ Minta pada seluruh anggota DPRD di group whatsapp jangan meruncing semua masalah ke Pimpinan DPRD, kadang diundang rapat tidak hadir di whatsapp ribut yang disalahkan pimpinan, dan pada Setwan karena bagian dari DPRD jika ada pengurangan anggaran untuk kegiatan DPRD agar di sampaikan ke Pimpinan atau Anggota DPRD sehingga terjalin hubungan kerja sama dan kemitraan yang baik.

Jamalus Yatim

- ✓ Saya ingin mengulang lagi dan ingin mempertegas apa yang disampaikan Wakil Ketua DPRD tadi Bang Hakimin, SH, untuk komentar di whatsapp agar kita sesama anggota DPRD saling harga menghargai jangan terkesan ingin memojokan Ketua DPRD, ada pula yang mengatakan Ketua DPRD akan diberhentikan sudah kesepakatan Fraksi, saya kira itu bukan

wilayahnya anggota DPRD tetapi itu adalah kewenangan ketua partai untuk mengantikan Pimpinan DPRD itu.

Aljufri, SH, MH

- ✓ Siang nanti kita rapat agar tanpa dihadiri oleh Sekwan dan lainnya dan untuk pembicaraan anggota DPRD di whatsapp akan sama-sama kita evaluasi demi marwah DPRD kedepan.

Pimpinan Rapat (H. Aprial Habas Buya Piai, SH, MH)

- ✓ Untuk group saya harap agar dipakai untk konsultasi yang lain jika ada kalau memang ada sesuatu agar disampaikan ke Pimpinan Fraksi yang ke group whatsapp. Tadi kita sudah sepakat untuk melakukan hearing komisi dengan mitra kerja tetapi pendapat Pimpinan lain masih ada yang belum sepakat masih menguatirkan ending yang tidak maksimal dari hearing komisi dengan mitra kerja atau OPD.
- ✓ Rapat nanti siang saya juga setuju kita internal tanpa Sekwan dan rapat ini sangat penting maka seluruh fraksi hari ini harus hadir *sepakat, dengan ketukan palu 1 kali.*

Ucapan maaf pimpinan rapat jika ada kekeliruan selama memimpin rapat.

Dengan mengucapkan "*Alhamdulillah Rabbil'Alamin*" Pimpinan Rapat tutup rapat Jam 12.³⁵
Wib. Dengan ketukan palu 3 X kali.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Wakil Ketua,

H. APRIAL HABAS BUYA PIAL, SH, MH